

Analisis Kebutuhan Tenaga *Content Creator* dalam Pengelolaan Informasi Publik (Studi Kualitatif di Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung)

Amelia Steffanny¹, Firman Yudhanegara²
Manajemen, UIN Sunan Gunung Djati Bandung^{1,2}

*Email: privasiamelia27@gmail.com, firman.yudha@uinsgd.ac.id

Sejarah Artikel:

Diterima 20-06-2026
Disetujui 26-06-2026
Diterbitkan 27-06-2026

ABSTRACT

The rapid development of digital technology and the increasing use of social media have transformed how people access information, including public information provided by government institutions. This situation requires public organizations to manage social media more professionally by delivering informative, educational, and engaging content. This study aims to analyze the need for content creators in managing public information at the Bandung City Manpower Office. A qualitative approach with a case study method was employed. Data were collected through in-depth interviews, observations, and document analysis and were analyzed using an interactive analysis model. The findings indicate that social media management involves content planning, educational and informational content production, activity documentation, editing, and content publication, all of which require specialized skills and considerable time allocation. Limited human resources and increasing workload highlight the need for dedicated content creator personnel to support effective public information management. This study emphasizes that content creators have become a strategic necessity in supporting government public communication in the digital era.

Keyword: *content creator; public information; social media; human resource planning; public communication*

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital dan meningkatnya penggunaan media sosial telah mengubah cara masyarakat memperoleh informasi, termasuk informasi publik yang disampaikan oleh instansi pemerintah. Kondisi ini menuntut organisasi publik untuk mengelola media sosial secara lebih profesional melalui penyediaan konten yang informatif, edukatif, dan menarik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebutuhan tenaga content creator dalam pengelolaan informasi publik di Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas pengelolaan media sosial meliputi perencanaan konten, produksi konten edukatif dan informatif, dokumentasi kegiatan, editing, serta publikasi konten yang membutuhkan kompetensi khusus dan alokasi waktu yang cukup besar. Keterbatasan sumber daya manusia serta tingginya beban kerja menunjukkan perlunya tenaga content creator khusus untuk mendukung efektivitas pengelolaan informasi publik. Penelitian ini menegaskan bahwa content creator merupakan kebutuhan strategis dalam mendukung komunikasi publik pemerintah di era digital.

Kata Kunci: *content creator; informasi publik; media sosial; sumber daya manusia; komunikasi publik*

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Steffanny, A., & Yudhanegara, F. (2026). Analisis Kebutuhan Tenaga Content Creator dalam Pengelolaan Informasi Publik (Studi Kualitatif di Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung). *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(4), 6770-6780. <https://doi.org/10.63822/zgsqfq88>

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang signifikan terhadap cara masyarakat memperoleh dan mengakses informasi. Kemajuan internet serta meningkatnya penggunaan perangkat digital membuat arus informasi menjadi lebih cepat, mudah, dan dapat diakses kapan saja tanpa terbatas oleh ruang dan waktu. Kondisi ini mendorong berbagai organisasi, baik sektor swasta maupun instansi pemerintah, untuk beradaptasi dengan pola komunikasi yang lebih modern melalui pemanfaatan media digital. Jika sebelumnya penyampaian informasi banyak dilakukan melalui media cetak, surat resmi, atau tatap muka, saat ini media sosial telah menjadi salah satu sarana utama dalam menjangkau masyarakat secara luas.

Media sosial memiliki peran yang sangat penting pada era digital karena telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Berbagai platform seperti Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, dan X tidak lagi hanya digunakan sebagai media hiburan atau interaksi sosial, tetapi juga telah berkembang menjadi sumber informasi utama bagi masyarakat. Berbagai informasi mengenai pendidikan, kesehatan, ekonomi, ketenagakerjaan, hingga layanan publik kini banyak dicari dan diperoleh melalui media sosial. Kemudahan akses, kecepatan penyebaran informasi, serta format penyajian yang menarik menjadikan media sosial sebagai pilihan utama masyarakat dalam memenuhi kebutuhan informasi mereka.

Fenomena tersebut sejalan dengan Teori Media Baru (New Media Theory) yang menjelaskan bahwa perkembangan teknologi digital telah mengubah pola komunikasi dari yang sebelumnya bersifat satu arah menjadi lebih interaktif, cepat, dan partisipatif. Melalui media sosial, masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima informasi, tetapi juga dapat memberikan tanggapan, masukan, maupun umpan balik secara langsung kepada organisasi. Perubahan pola komunikasi ini menuntut organisasi untuk tidak hanya hadir di media sosial, tetapi juga mampu mengelola informasi secara efektif agar dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat yang semakin tinggi terhadap akses informasi yang cepat dan mudah.

Perubahan perilaku masyarakat tersebut menuntut organisasi untuk memanfaatkan media sosial secara optimal sebagai sarana komunikasi dan penyebaran informasi. Bagi instansi pemerintah, media sosial menjadi media yang strategis untuk menyampaikan informasi mengenai kebijakan, program kerja, pelayanan publik, pengumuman, maupun berbagai kegiatan organisasi kepada masyarakat. Pemanfaatan media sosial yang efektif dapat meningkatkan keterbukaan informasi, memperluas jangkauan komunikasi, serta mendekatkan pemerintah dengan masyarakat melalui komunikasi yang lebih cepat dan interaktif. Oleh karena itu, pengelolaan media sosial tidak lagi dapat dipandang sebagai aktivitas tambahan, melainkan sebagai salah satu fungsi penting dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan publik.

Seiring meningkatnya peran media sosial, ekspektasi masyarakat terhadap kualitas informasi yang disampaikan juga semakin tinggi. Masyarakat tidak hanya mengharapkan informasi yang akurat dan terpercaya, tetapi juga menginginkan informasi yang dikemas secara menarik, mudah dipahami, dan sesuai dengan karakteristik platform digital yang digunakan. Konten dalam bentuk infografis, desain visual, video pendek, dokumentasi kegiatan, hingga konten edukatif menjadi format yang lebih diminati dibandingkan penyampaian informasi secara konvensional. Akibatnya, proses penyebaran informasi kini memerlukan perencanaan dan pengelolaan yang lebih kompleks agar pesan yang disampaikan dapat diterima secara efektif oleh masyarakat.

Namun demikian, masih banyak organisasi yang belum menyadari bahwa pengelolaan media sosial membutuhkan sumber daya manusia dengan kompetensi khusus. Pengelolaan media sosial sering kali dianggap sebagai pekerjaan tambahan yang dapat dilakukan oleh pegawai yang telah memiliki tugas pokok dan fungsi lainnya. Padahal, aktivitas pengelolaan media sosial mencakup berbagai proses mulai dari

perencanaan konten, pengumpulan informasi, penulisan naskah, desain grafis, pengambilan dokumentasi, editing foto dan video, publikasi konten, hingga evaluasi performa konten. Seluruh proses tersebut membutuhkan waktu, kreativitas, kemampuan teknis, dan pemahaman mengenai strategi komunikasi digital yang tidak sederhana.

Dalam perspektif Perencanaan Sumber Daya Manusia (Human Resource Planning), setiap organisasi perlu memastikan bahwa jumlah dan kompetensi pegawai yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan pekerjaan yang harus dilaksanakan. Perencanaan sumber daya manusia bertujuan untuk menjamin tersedianya tenaga kerja yang tepat pada posisi yang tepat sehingga organisasi dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Dengan demikian, kebutuhan tenaga content creator tidak hanya berkaitan dengan penambahan jumlah pegawai, tetapi juga berkaitan dengan kompetensi khusus yang diperlukan dalam pengelolaan informasi publik berbasis digital.

Selain itu, Teori Analisis Beban Kerja (Workload Analysis) menjelaskan bahwa kebutuhan tenaga kerja dapat ditentukan berdasarkan volume pekerjaan, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan, serta kapasitas pegawai yang tersedia. Dalam konteks pengelolaan media sosial, meningkatnya tuntutan produksi konten, dokumentasi kegiatan, interaksi dengan masyarakat, serta kebutuhan pembaruan informasi secara berkelanjutan menunjukkan adanya beban kerja yang tidak sedikit. Apabila aktivitas tersebut dibebankan kepada pegawai yang telah memiliki tugas utama lainnya, maka terdapat potensi terjadinya penumpukan pekerjaan yang dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas pokok maupun kualitas informasi yang dipublikasikan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan media sosial bukan sekadar aktivitas administratif, melainkan sebuah fungsi kerja yang memiliki karakteristik dan tuntutan kompetensi tersendiri. Dalam praktiknya, tenaga content creator memiliki peran penting dalam mengolah informasi menjadi konten yang informatif, menarik, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Selain itu, content creator juga dituntut untuk memahami tren media sosial, karakteristik audiens, serta strategi komunikasi digital agar informasi yang disampaikan mampu menjangkau sasaran secara optimal. Oleh karena itu, keberadaan tenaga content creator tidak lagi dapat dipandang sebagai kebutuhan pendukung semata, melainkan sebagai bagian dari kebutuhan organisasi dalam menjalankan fungsi komunikasi publik.

Dalam lingkungan instansi pemerintah, kebutuhan tersebut menjadi semakin penting mengingat tuntutan keterbukaan informasi publik yang terus meningkat. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan informasi yang mudah diakses, akurat, dan relevan bagi masyarakat. Media sosial menjadi salah satu sarana yang efektif untuk mewujudkan tujuan tersebut karena mampu menjangkau masyarakat secara luas dengan biaya yang relatif efisien. Namun, efektivitas pemanfaatan media sosial sangat bergantung pada kemampuan organisasi dalam mengelola dan memproduksi konten secara konsisten dan profesional.

Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung sebagai instansi yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan juga menghadapi tuntutan yang sama dalam penyebaran informasi kepada masyarakat. Berbagai informasi mengenai lowongan pekerjaan, pelatihan kerja, bursa kerja, program peningkatan kompetensi tenaga kerja, hubungan industrial, serta berbagai layanan ketenagakerjaan lainnya perlu disampaikan secara cepat dan mudah diakses oleh masyarakat. Mengingat masyarakat saat ini lebih banyak mencari informasi melalui media sosial, maka keberadaan pengelolaan konten digital yang efektif menjadi faktor penting dalam mendukung penyebaran informasi publik di lingkungan Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung.

Meskipun demikian, kebutuhan tenaga content creator di lingkungan instansi pemerintah masih belum sepenuhnya menjadi perhatian dalam perencanaan sumber daya manusia. Banyak organisasi yang belum melakukan analisis secara mendalam mengenai kebutuhan tenaga kerja khusus di bidang pengelolaan konten digital. Akibatnya, tugas tersebut masih sering dirangkap oleh pegawai lain yang memiliki fungsi kerja berbeda. Padahal, meningkatnya penggunaan media sosial sebagai sumber informasi masyarakat menunjukkan bahwa pengelolaan informasi digital memerlukan perhatian yang lebih serius agar informasi publik dapat tersampaikan secara efektif.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan kajian mengenai kebutuhan tenaga content creator dalam pengelolaan informasi publik di Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebutuhan tenaga content creator berdasarkan kondisi pengelolaan media sosial, beban kerja yang dihadapi, serta ketersediaan sumber daya manusia yang ada. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pentingnya tenaga kerja khusus dalam pengelolaan informasi publik berbasis digital sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi organisasi dalam menyusun perencanaan sumber daya manusia yang lebih sesuai dengan tuntutan komunikasi publik di era digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam kebutuhan tenaga content creator dalam pengelolaan informasi publik di Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung. Desain studi kasus digunakan karena penelitian berfokus pada satu organisasi yang menjadi objek penelitian sehingga memungkinkan peneliti memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kondisi aktual pengelolaan media sosial, pembagian tugas pegawai, beban kerja yang berkaitan dengan produksi konten digital, serta kebutuhan sumber daya manusia yang diperlukan dalam mendukung komunikasi publik berbasis digital.

Objek penelitian adalah kebutuhan tenaga content creator dalam pengelolaan informasi publik, sedangkan subjek penelitian terdiri atas pegawai yang terlibat dalam pengelolaan media sosial dan informasi publik di Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling dengan mempertimbangkan tingkat keterlibatan, pengetahuan, dan pengalaman informan terhadap aktivitas pengelolaan informasi publik. Informan meliputi pejabat yang membidangi pengelolaan informasi publik, pengelola media sosial, pegawai yang terlibat dalam pembuatan konten digital, serta pihak yang memahami perencanaan sumber daya manusia dalam organisasi. Pengumpulan data dilakukan hingga mencapai titik kejenuhan data (data saturation), yaitu ketika informasi yang diperoleh telah menunjukkan pola yang berulang dan tidak ditemukan informasi baru yang signifikan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan secara semi-terstruktur untuk memperoleh informasi mengenai proses pengelolaan media sosial, aktivitas pembuatan konten, pembagian tugas, kompetensi yang dibutuhkan, serta kendala yang dihadapi dalam pengelolaan informasi publik. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung aktivitas pengelolaan media sosial dan proses produksi konten digital di lingkungan organisasi. Sementara itu, studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah dokumen yang berkaitan dengan struktur organisasi, analisis jabatan, analisis beban kerja, data kepegawaian, standar operasional prosedur, serta dokumen lain yang mendukung penelitian.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti (human instrument) yang berperan dalam mengumpulkan, mengolah, dan menginterpretasikan data. Untuk mendukung proses pengumpulan data,

digunakan pedoman wawancara, lembar observasi, alat perekam, serta dokumen organisasi yang relevan dengan fokus penelitian. Pedoman wawancara disusun berdasarkan indikator yang berasal dari Teori Perencanaan Sumber Daya Manusia (Human Resource Planning), Teori Analisis Beban Kerja (Workload Analysis), dan Teori Media Baru (New Media Theory).

Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih, menyederhanakan, dan mengelompokkan data yang relevan dengan fokus penelitian. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk narasi sehingga memudahkan peneliti dalam mengidentifikasi pola dan hubungan antar temuan. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi yang dilakukan secara berkelanjutan selama proses penelitian untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai kebutuhan tenaga content creator dalam pengelolaan informasi publik.

Untuk menjamin kredibilitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik ini digunakan untuk memastikan konsistensi dan keabsahan data sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebutuhan Pengelolaan Informasi Publik Melalui Media Sosial

Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi salah satu sarana utama dalam penyebaran informasi publik di Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung. Berbagai informasi terkait program ketenagakerjaan, pelatihan kerja, bursa kerja, kegiatan organisasi, serta layanan kepada masyarakat dipublikasikan melalui platform media sosial yang dimiliki instansi. Pemanfaatan media sosial dipandang lebih efektif dibandingkan media konvensional karena mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas, cepat, dan interaktif.

Peningkatan penggunaan media sosial dalam penyebaran informasi publik menunjukkan adanya perubahan pola pencarian informasi di masyarakat. Masyarakat tidak lagi hanya memperoleh informasi melalui situs web resmi atau media massa, tetapi juga melalui platform media sosial yang dapat diakses dengan mudah melalui perangkat digital. Kondisi ini menyebabkan organisasi publik dituntut untuk mampu menghadirkan informasi yang tidak hanya akurat, tetapi juga menarik dan mudah dipahami oleh berbagai kelompok masyarakat.

Temuan ini menunjukkan bahwa fungsi media sosial dalam organisasi publik telah berkembang dari sekadar media publikasi menjadi instrumen komunikasi publik yang strategis. Perubahan tersebut sejalan dengan perkembangan media digital yang menempatkan media sosial sebagai ruang interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan informasi publik tidak lagi hanya berorientasi pada penyampaian informasi, tetapi juga pada kemampuan organisasi dalam mengemas informasi agar dapat diterima dan dipahami secara efektif oleh masyarakat.

Aktivitas Content Creation dalam Pengelolaan Informasi Publik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan informasi publik melalui media sosial melibatkan berbagai aktivitas yang cukup kompleks. Aktivitas tersebut meliputi pengumpulan informasi dari unit kerja,

penyusunan naskah konten, desain grafis, dokumentasi kegiatan, pengambilan foto dan video, penyuntingan konten, publikasi pada media sosial, serta pemantauan respons masyarakat terhadap informasi yang dipublikasikan.

Temuan ini menunjukkan bahwa aktivitas content creation tidak hanya berfokus pada proses pembuatan desain atau unggahan media sosial semata. Produksi konten digital merupakan rangkaian pekerjaan yang membutuhkan kombinasi kemampuan komunikasi, kreativitas, literasi digital, dan kemampuan teknis dalam penggunaan perangkat lunak pengolahan media. Semakin beragam jenis informasi yang harus dipublikasikan, semakin besar pula kebutuhan waktu dan kompetensi yang diperlukan untuk menghasilkan konten yang berkualitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan informasi publik melalui media sosial di Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung melibatkan berbagai aktivitas yang cukup kompleks dan dilakukan secara berkelanjutan. Aktivitas tersebut tidak hanya mencakup proses publikasi informasi, tetapi juga meliputi perencanaan konten (*content planning*), pengumpulan bahan informasi, penyusunan naskah, pembuatan desain visual, dokumentasi kegiatan, pengambilan foto dan video, proses penyuntingan (*editing*), hingga publikasi dan evaluasi konten pada media sosial organisasi.

Berdasarkan hasil penelitian, aktivitas content creation memiliki karakteristik pekerjaan yang berbeda dengan tugas administratif maupun pelayanan publik yang menjadi fungsi utama sebagian besar pegawai. Oleh karena itu, aktivitas tersebut memerlukan perhatian khusus dalam perencanaan sumber daya manusia agar pelaksanaannya tidak mengganggu tugas utama organisasi.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, proses pengelolaan media sosial diawali dengan penyusunan rencana konten (*content plan*) yang disesuaikan dengan program kerja, agenda kegiatan, serta kebutuhan informasi masyarakat. Perencanaan konten dilakukan untuk memastikan informasi yang disampaikan dapat tersusun secara terstruktur dan dipublikasikan secara konsisten. Melalui perencanaan tersebut, organisasi dapat menentukan tema, jenis konten, target audiens, serta waktu publikasi yang sesuai dengan kebutuhan komunikasi publik.

Konten yang diproduksi oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung memiliki beberapa tujuan utama, yaitu sebagai sarana edukasi, penyebaran informasi terkini, serta dokumentasi dan publikasi kegiatan organisasi. Konten edukatif digunakan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai isu ketenagakerjaan, prosedur pelayanan, pelatihan kerja, pengembangan kompetensi tenaga kerja, serta berbagai program pemerintah di bidang ketenagakerjaan. Sementara itu, konten informatif berfungsi menyampaikan informasi terbaru seperti pengumuman pelatihan, bursa kerja, lowongan pekerjaan, jadwal kegiatan, dan berbagai program yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Selain itu, media sosial juga digunakan sebagai sarana publikasi dan dokumentasi kegiatan organisasi melalui konten yang merangkum (*recap*) berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa proses produksi konten memerlukan berbagai keterampilan teknis dan kreatif. Pembuatan konten tidak hanya berfokus pada penyampaian informasi, tetapi juga pada bagaimana informasi tersebut dikemas agar menarik, mudah dipahami, dan sesuai dengan karakteristik pengguna media sosial. Oleh karena itu, proses editing foto, video, maupun desain grafis menjadi bagian penting dalam pengelolaan informasi publik. Kualitas visual dan penyajian konten menjadi faktor yang menentukan efektivitas penyampaian pesan kepada masyarakat.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa aktivitas content creation merupakan rangkaian pekerjaan yang terdiri atas berbagai tahapan yang saling berkaitan dan membutuhkan alokasi waktu yang cukup besar. Semakin banyak informasi dan kegiatan organisasi yang perlu dipublikasikan, semakin tinggi pula kebutuhan terhadap tenaga yang mampu melakukan perencanaan, produksi, dan pengelolaan konten secara

profesional. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pengelolaan media sosial tidak dapat dipandang sebagai pekerjaan tambahan semata, melainkan sebagai fungsi komunikasi publik yang membutuhkan kompetensi khusus dan dukungan sumber daya manusia yang memadai.

Beban Kerja Pengelolaan Media Sosial dan Ketersediaan Sumber Daya Manusia

Penelitian menemukan bahwa pengelolaan media sosial masih dilakukan oleh pegawai yang memiliki tugas pokok lainnya. Pengelolaan konten digital belum sepenuhnya ditangani oleh tenaga khusus yang memiliki jabatan atau fungsi kerja sebagai content creator. Akibatnya, proses produksi konten sering kali harus disesuaikan dengan pelaksanaan tugas utama pegawai yang bersangkutan.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara volume pekerjaan yang berkaitan dengan pengelolaan media sosial dan ketersediaan sumber daya manusia yang menangani pekerjaan tersebut. Meningkatnya kebutuhan publikasi informasi, dokumentasi kegiatan, serta tuntutan pembaruan informasi secara cepat menyebabkan beban kerja pengelolaan media sosial terus meningkat. Di sisi lain, jumlah pegawai yang terlibat dalam aktivitas tersebut masih terbatas.

Temuan ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara kebutuhan organisasi dalam pengelolaan komunikasi digital dengan kapasitas sumber daya manusia yang tersedia. Apabila kondisi tersebut berlangsung dalam jangka panjang, terdapat potensi menurunnya kualitas informasi yang dipublikasikan maupun efektivitas pelaksanaan tugas utama pegawai karena adanya pekerjaan tambahan yang harus diselesaikan secara bersamaan.

Analisis Kebutuhan Tenaga Content Creator

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebutuhan tenaga content creator di Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung tidak hanya didasarkan pada kebutuhan produksi konten semata, tetapi juga pada meningkatnya tuntutan komunikasi publik di era digital. Kebutuhan tersebut muncul karena aktivitas pengelolaan media sosial memerlukan kompetensi khusus yang tidak selalu dimiliki oleh seluruh pegawai.

Analisis terhadap aktivitas kerja yang dilakukan menunjukkan bahwa tenaga content creator diperlukan untuk menjalankan fungsi perencanaan konten, produksi konten visual, dokumentasi kegiatan, pengelolaan media sosial, serta evaluasi performa konten. Keberadaan tenaga khusus akan memungkinkan organisasi menghasilkan informasi yang lebih konsisten, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Temuan ini memperlihatkan bahwa kebutuhan tenaga content creator bukan semata-mata akibat perkembangan teknologi, melainkan merupakan konsekuensi dari perubahan pola komunikasi publik. Ketika masyarakat menjadikan media sosial sebagai sumber utama informasi, organisasi publik perlu menyesuaikan struktur dan kapasitas sumber daya manusianya agar mampu memenuhi kebutuhan tersebut secara optimal.

Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebutuhan tenaga content creator dalam pengelolaan informasi publik di Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meningkatnya penggunaan media sosial sebagai sumber informasi masyarakat telah mendorong perubahan kebutuhan organisasi dalam pengelolaan komunikasi publik. Aktivitas pengelolaan media sosial tidak lagi dapat dipandang sebagai pekerjaan tambahan, melainkan telah berkembang menjadi fungsi kerja yang memerlukan kompetensi dan alokasi sumber daya manusia secara khusus.

Dari perspektif Teori Media Baru, temuan penelitian menunjukkan bahwa perubahan perilaku masyarakat dalam mengakses informasi telah menciptakan kebutuhan baru bagi organisasi publik untuk hadir secara aktif di ruang digital. Media sosial memungkinkan terjadinya komunikasi yang lebih cepat dan interaktif sehingga organisasi dituntut untuk mampu menyediakan informasi yang relevan, menarik, dan mudah diakses. Kondisi ini menjelaskan mengapa kebutuhan tenaga content creator semakin penting dalam mendukung efektivitas komunikasi publik.

Dari perspektif Analisis Beban Kerja, hasil penelitian menunjukkan bahwa volume pekerjaan yang berkaitan dengan pengelolaan media sosial cenderung lebih besar dibandingkan kapasitas sumber daya manusia yang tersedia. Kegiatan produksi konten yang meliputi perencanaan, dokumentasi, desain, penyuntingan, dan publikasi membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Ketika aktivitas tersebut dibebankan kepada pegawai yang telah memiliki tugas utama lainnya, maka terjadi peningkatan beban kerja yang berpotensi memengaruhi kualitas pelaksanaan pekerjaan.

Sementara itu, berdasarkan perspektif Perencanaan Sumber Daya Manusia, kebutuhan tenaga content creator menunjukkan pentingnya penyesuaian antara kebutuhan organisasi dan kompetensi pegawai yang tersedia. Organisasi tidak hanya membutuhkan tambahan tenaga kerja, tetapi juga memerlukan pegawai dengan kompetensi khusus di bidang komunikasi digital dan produksi konten. Dengan demikian, pemenuhan kebutuhan tenaga content creator dapat menjadi salah satu strategi organisasi dalam meningkatkan kualitas pengelolaan informasi publik.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kebutuhan tenaga content creator tidak hanya dipengaruhi oleh frekuensi publikasi konten, tetapi juga oleh keragaman jenis konten yang harus diproduksi. Di Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung, konten yang dipublikasikan mencakup konten edukatif, informatif, dan dokumentatif. Ketiga jenis konten tersebut memiliki karakteristik dan proses produksi yang berbeda. Konten edukatif membutuhkan proses penyederhanaan informasi agar mudah dipahami masyarakat, konten informatif menuntut kecepatan dalam penyampaian informasi terkini, sedangkan konten dokumentatif memerlukan proses peliputan dan penyuntingan untuk merepresentasikan kegiatan organisasi secara menarik. Variasi kebutuhan konten tersebut menunjukkan bahwa aktivitas content creation memiliki kompleksitas yang lebih tinggi dibandingkan sekadar proses unggah informasi pada media sosial.

Temuan penelitian ini memperkuat hasil berbagai penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa transformasi digital telah meningkatkan kebutuhan kompetensi komunikasi digital di lingkungan organisasi. Namun demikian, penelitian ini memberikan perspektif yang berbeda karena menempatkan tenaga content creator sebagai kebutuhan sumber daya manusia yang perlu dianalisis secara khusus dalam konteks instansi pemerintah daerah. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak membahas efektivitas media sosial sebagai sarana komunikasi publik, sedangkan penelitian ini menyoroti aspek kebutuhan tenaga kerja yang menjadi faktor pendukung keberhasilan pengelolaan informasi publik.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan tenaga content creator merupakan kebutuhan yang semakin penting dalam organisasi publik. Perubahan perilaku masyarakat dalam mengakses informasi, meningkatnya tuntutan komunikasi digital, serta kompleksitas aktivitas pengelolaan media sosial menjadi faktor utama yang mendorong perlunya tenaga khusus dalam mendukung pengelolaan informasi publik secara efektif dan berkelanjutan.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa meningkatnya pemanfaatan media sosial sebagai sumber informasi masyarakat telah mendorong munculnya kebutuhan tenaga content creator dalam pengelolaan informasi publik di Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung. Aktivitas perencanaan konten, produksi konten edukatif dan informatif, dokumentasi kegiatan, serta proses editing memerlukan kompetensi dan alokasi waktu yang tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada pegawai yang telah memiliki tugas pokok lainnya. Temuan ini memperluas kajian perencanaan sumber daya manusia pada sektor publik dengan menempatkan content creator sebagai kebutuhan strategis dalam komunikasi digital pemerintah. Penelitian selanjutnya dapat mengukur kebutuhan tenaga content creator melalui analisis beban kerja secara kuantitatif dan pada instansi pemerintah lainnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam pelaksanaan penelitian ini. Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung yang telah memberikan kesempatan dan akses kepada penulis untuk melakukan penelitian serta memperoleh data yang diperlukan. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada para informan yang telah meluangkan waktu dan memberikan informasi yang sangat berharga selama proses pengumpulan data. Selain itu, apresiasi disampaikan kepada dosen pembimbing, rekan-rekan, serta seluruh pihak yang telah memberikan masukan, dukungan, dan bantuan sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang manajemen sumber daya manusia dan komunikasi publik di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, R. S., Soemartono, T., Sukmana, P., & Rachmatsyah, T. H. (2025). Developing a human resource management model for e-government implementation in the public sector. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 13(5). <https://doi.org/10.37641/jimkes.v13i5.3789>
- Arwani, H. I. W., & Krypton, A. (2025). Institutional communication in the digital era: Social media content planning in public relations workflows. *Linkage*, 2(1). <https://doi.org/10.61511/linkage.v2i1.2025.2032>
- Cho, W., & Melisa, W. D. (2021). Citizen coproduction and social media communication: Delivering a municipal government's urban services through digital participation. *Administrative Sciences*, 11(2), 59. <https://doi.org/10.3390/admsci11020059>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- DePaula, N., Dincelli, E., & Harrison, T. M. (2018). Toward a typology of government social media communication: Democratic goals, symbolic acts and self-presentation. *Government Information Quarterly*, 35(1), 98–108. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2017.10.003>
- Dunan, A. (2020). Government communications in digital era: Public relation and democracy. *Jurnal Pekommas*, 5(1), 1–12. <https://doi.org/10.30818/jpkm.2020.2050108>

- Giannoukou, I., Giotopoulos, K. C., Michalopoulos, D., Vonitsanos, G., Papadopoulos, D., & Sioutas, S. (2024). Dynamic workload management system in the public sector. *Information*, 15(6), 335. <https://doi.org/10.3390/info15060335>
- Jamalullail, Safira, F., & Hamdi. (2023). The government communication strategy through social media to increase public awareness. *Nyimak: Journal of Communication*, 7(2). <https://doi.org/10.31000/nyimak.v7i2.7985>
- Mahadewi, D. T., & Darma, G. S. (2024). Government public communication strategy through social media in the digital era (Case study on Bangli Regency Government). *Eduvest: Journal of Universal Studies*, 4(6). <https://doi.org/10.59188/eduvest.v4i6.1334>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Nurfalah, F., Nuruzzaman, M., Khumayah, S., & Irawan, N. (2025). Digital communication strategy for government public relations in Indonesia and Thailand. *International Journal of Communication and Public Relation*. <https://doi.org/10.47604/ijcpr.3595>
- Paroli, P. (2025). Transforming human resource planning: Building a strong foundation for achieving good governance. *Golden Ratio of Social Science and Education*, 5(1). <https://doi.org/10.52970/grsse.v5i1.919>
- Susanti, T., Anom, E., & Iswadi. (2023). Optimizing public communication in the digital era: A case study of the Ministry of Communication and Information Technology in Indonesia. *CHANNEL: Jurnal Komunikasi*, 11(2). <https://doi.org/10.12928/channel.v11i2.468>
- Wachid, I. B., Wulandari, M. P., & Nasution, Z. (2024). Evolving human resource dimension in Indonesia's digital public relations landscape. *Jurnal Studi Komunikasi*, 8(2). <https://doi.org/10.25139/jsk.v8i2.8267>
- Yu, J., & Zhao, Y. (2024). Communication effectiveness and influencing factors of government new media: A cross-platform comparison from the perspective of social presence theory. *Journal of Beijing University of Aeronautics and Astronautics Social Sciences Edition*, 37(2), 147–156. <https://doi.org/10.13766/j.bhsk.1008-2204.2023.2107>
- Zhu, D., Abu-Shanab, E., & Al-Rahmi, W. M. (2018). Towards a theory of SocioCitizenry: Quality anticipation, trust configuration, and approved adaptation of governmental social media. *International Journal of Information Management*, 43, 261–272. <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2018.08.009>